

**PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

## KATA PENGANTAR

### **Om Swastyastu,**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

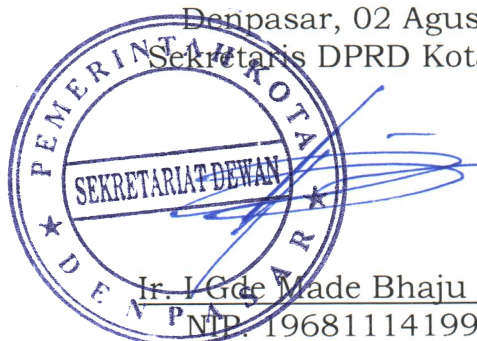
Perubahan rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan program dan kegiatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyusunan perubahan rencana kerja ini menjadi upaya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 dan target kinerja RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Kami berharap penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2022 ini, tetap merepresentasikan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini. Selanjutnya, kami berharap agar perubahan rencana kerja ini dapat dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

### **Om Shanti, Shanti, Shanti Om**

Denpasar, 02 Agustus 2022  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	6
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	6
2.2 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	8
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD..	20
BAB IV PENUTUP.....	32

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 Kota Denpasar .....	12
Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra dan Renja. Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Penyusunan perubahan renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 harus berpedoman pada perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administratif keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Penyusunan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 dan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang telah melakukan pergeseran

anggaran antar objek belanja dan perubahan uraian belanja sebanyak 2 (dua) kali. Realisasi fisik kegiatan tercapai 59,04% dengan realisasi serapan anggaran sebesar 38.96% dari pagu anggaran sebesar Rp 80.772.449.649,- atau 72,86% dari pagu anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 43.198.029.451,-.

Memperhatikan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2022, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan rencana kerja terhadap proyeksi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran melalui perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Bali Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
20. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026;
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76); dan
24. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah :

1. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022,
2. Merumuskan perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar selama tahun berjalan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**  
Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dan penjabaran isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**  
Pada bab ini menjelaskan tentang perubahan rencana kerja dan kebutuhan anggaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam upaya mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar.
- BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan berdasarkan tugas dan fungsinya, yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok :

1. menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan,
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
3. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah “Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD”, yang diukur dengan “Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan”. Berikut adalah analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	Telah dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Tahun 2022

## **2.2 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2022 bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 mengacu pada hasil laporan kinerja triwulan dan/atau realisasi APBD yaitu sebagai berikut :

### **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realiasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja / keluaran yang direncanakan adalah pada sub kegiatan :

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, sub kegiatan ini merupakan fasilitasi pemberian salah satu tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD khususnya penyediaan pakaian yang bercirikan khas daerah. Fasilitasi ini diberikan pada bulan Oktober 2022 atau Triwulan IV tahun 2022.
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, sub kegiatan ini merupakan fasilitasi pemberian salah satu tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD khususnya penyediaan jaminan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan / medical check up. Fasilitasi ini diberikan pada bulan September 2022 atau Triwulan III tahun 2022.
- Pembahasan KUA dan PPAS; Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan Pembahasan APBD, sub kegiatan ini merupakan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran yang mulai dilaksanakan sejak Juli 2022 atau Triwulan III tahun 2022.
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Penggunaan Anggaran, sub kegiatan ini merupakan fasilitasi dalam melakukan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, belum adanya kebutuhan fasilitasi pembahasan sebagai mana dimaksud.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi fisik program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 mencapai 59,04% dengan serapan anggaran sebesar 38,96% atau Rp 31,472,118,313,- dari Rp 80.772.449.649,- atau serapan anggaran sebesar 72,86% dari target anggaran triwulan II sebesar Rp 43,198,029,451. Adapun realisasi kegiatan / sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah :

- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, kegiatan ini merupakan fasilitasi untuk Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar terkait pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 pada dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan pada April 2022.
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, telah menyediakan sebanyak 5 orang fraksi sesuai dengan yang direncanakan untuk masing-masing fraksi DPRD Kota Denpasar yaitu Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Nasdem-PSI.

**3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Realisasi fisik program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang melebihi target kinerja adalah pada sub kegiatan :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, merupakan fasilitasi rapat kerja Badan Propemperda DPRD Kota Denpasar dengan Tim Penyusun membahas Ranperda Inisiatif DPRD yang telah diselenggarakan sebanyak 3 kali dari target minimal 2 kali.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- Tersedianya anggaran yang cukup memadai,
- Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai,
- Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD,
- Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan

DPRD,

- Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran,
- Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder,
- Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan
- Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas,
- Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
- Kurangnya kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
- Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD,
- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD,
- Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat,
- Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dan
- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok pakar dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah :

- pelayanan birokrasi yang baik dan akuntabel guna mengoptimalkan penatausahaan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dan
- meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

**6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Dalam rangka efektifitas serapan anggaran dan pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang rentang kendali pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar,
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam hal pengoptimalan anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan ASN dan DPRD dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya,
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,
- Melakukan survey kepuasan pelayanan kesekretariatan terhadap seluruh pelayanan yang diberikan dan mengevaluasinya secara berkala, serta
- Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan selama memberikan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 Kota Denpasar**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2022	
			K	Rp	K	Rp
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
4.02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	61,670,755,109	46.56%	26,786,109,522
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	14,833,556	50.00%	5,739,500
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,833,556	1 Dokumen	5,739,500
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	8,617,164,964	50.00%	3,041,600,277
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 Dokumen	8,617,164,964	19 Dokumen	3,041,600,277
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	1,364,298,770	50.44%	437,104,705
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	233,320,670	72.61%	58,230,200
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	76,159,100	41.36%	27,575,400
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	207,380,000	29.53%	24,488,000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	16,830,000	40.61%	3,908,250

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2022	
			K	Rp	K	Rp
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	569,569,000	55.66%	297,828,500
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	261,040,000	56.67%	25,074,355
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>2,501,510,493</b>	<b>50.00%</b>	<b>926,616,511</b>
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100%	600,000,000	50.00%	180,190,028
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	1,901,510,493	50.00%	746,426,483
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,006,700,000</b>	<b>34.43%</b>	<b>357,684,512</b>
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	370,000,000	50.43%	177,804,073
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	294,950,000	36.46%	78,700,439
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	92,250,000	15.74%	13,859,000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	249,500,000	35.08%	87,321,000
<b>4.02.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>350,072,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>32,975,000</b>

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2022	
			K	Rp	K	Rp
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100%	350,072,000	50.00%	32,975,000
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>47,515,758,826</b>	<b>57.14%</b>	<b>21,966,819,017</b>
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	47,135,248,826	8 Dokumen	21,966,819,017
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	45 Stel	277,310,000	0.00%	-
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 Orang	103,200,000	0.00%	-
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>300,416,500</b>	<b>30.45%</b>	<b>17,570,000</b>
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi	25 Kali	43,375,000	5 Kali	-
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat rapat DPRD	22 Kali	257,041,500	7 Kali	17,570,000
<b>4.02.02</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>1. Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu 2. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b> <b>86%</b>	<b>19,101,694,540</b>	<b>71.53%</b> <b>85.60%</b>	<b>4,686,008,791</b>
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4,028,890,300</b>	<b>67.86%</b>	<b>59,934,233</b>
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda</li> </ul>	2 Dokumen 100%	322,752,000	3 Dokumen 58.33%	54,758,733
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin Pansus</li> </ul>	12 Dokumen 100%	3,554,938,300	3 Dokumen 0.00%	5,175,500
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah dokumen rapat penyusunan	3 Dokumen	151,200,000	1 Dokumen	-

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2022	
			K	Rp	K	Rp
	dan/atau Naskah Akademik	naskah akademik				
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>573,923,000</b>	<b>88.41%</b>	<b>134,846,680</b>
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran</li> </ul>	5 Dokumen  100%	547,823,000	0.00%  72.62%	132,671,680
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	5 Dokumen	6,525,000	0.00%	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD	5 Dokumen	6,525,000	0.00%	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 Dokumen	6,525,000	1 Dokumen	1,050,000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	6,525,000	3 Dokumen	1,125,000
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>6,810,882,000</b>	<b>67.21%</b>	<b>1,640,168,891</b>
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum</li> </ul>	4 Dokumen  100%	1,669,068,000	4 Dokumen  61.41%	429,671,505
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur</li> </ul>	4 Dokumen  100%	1,788,505,000	5 Dokumen  60.61%	450,776,750

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2022	
			K	Rp	K	Rp
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat</li> </ul>	4 Dokumen	1,781,634,000	1 Dokumen	426,378,100
			100%		59.88%	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin bidang perekonomian</li> </ul>	4 Dokumen	1,565,675,000	3 Dokumen	333,342,536
			100%		58.85%	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 Dokumen	3,000,000	0.00%	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 Dokumen	3,000,000	0.00%	-
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>3,078,155,000</b>	<b>72.20%</b>	<b>900,905,291</b>
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	2 Kali	1,935,582,000	2 Kali	642,003,114
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pengangkatan kelompok pakar dan/atau tim ahli	6 Orang	360,000,000	3 Orang	45,000,000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 Orang	300,000,000	5 Orang	75,000,000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100%	5,625,000	58.33%	2,550,000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah</li> </ul>	12 Dokumen	476,948,000	10 Dokumen	136,352,177
			100%		59.93%	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pelaksanaan reses tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>3,512,134,440</b>	<b>66.67%</b>	<b>1,881,075,000</b>

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2022	
			K	Rp	K	Rp
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	3,512,134,440	2 Dokumen	1,881,075,000
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>172,072,000</b>	<b>58.33%</b>	<b>25,632,720</b>
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat kode etik</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin Badan kehormatan</li> </ul>	2 Dokumen 100%	172,072,000	0.00% 58.33%	25,632,720
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>925,637,800</b>	<b>80.00%</b>	<b>43,445,976</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rapat atau perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5 Kali	925,637,800	4.00%	43,445,976
<b>TOTAL</b>				<b>80,772,449,649</b>	<b>59.04%</b>	<b>31,472,118,313</b>

### **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu :

- Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Dari ketiga permasalahan diatas, yang menjadi isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah “Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”. Apabila isu strategis ditindaklanjuti dengan perumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan mampu direalisasikan atau diterapkan dengan baik, maka capaian visi dan misi Walikota Denpasar dalam pembangunan daerah, dan capaian program nasional tentu akan tercapai sebagaimana direncanakan. Dengan demikian, sebagai unsur pendukung urusan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kota

Denpasar berkontribusi dan berkomitmen beserta para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Beberapa hal yang menjadi tantangan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dipengaruhi oleh lingkungan yakni kondisi, situasi, dan keadaan peristiwa. Lingkungan yang dimaksud dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi; dan lingkungan eksternal yang menjadi peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*) organisasi. Identifikasi lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

### **Faktor Internal**

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

#### **Kekuatan (*strength*) :**

- a. Tersedianya anggaran yang cukup memadai,
- b. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai,
- c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dan
- d. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

#### **Kelemahan (*weakness*) :**

- a. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas,
- b. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD, dan
- d. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

### **Faktor Eksternal**

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang (*opportunity*) maupun tantangan (*threat*).

**Peluang (*opportunity*) :**

- a. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran,
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar,
- c. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder, dan
- d. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

**Tantangan (*threat*) :**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD,
- b. Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat,
- c. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
- d. Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, dan
- e. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dalam keterlibatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah hingga pelaporan kinerja sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerja pemenuhan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagaimana dimaksud terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program disusun dengan memperhatikan subbidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Berikut penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dan perumusan tujuan dan sasaran yang ditarget pada tahun 2022 :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Visi                | : | Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju  |
| Misi ke-3           | : | <b>Kejujuran</b> dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) |
| Tujuan Strategis    | : | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang prima   |
| – Indikator Kinerja | ➤ | <i>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</i>  |
| Sasaran Strategis   | : | Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD   |
| – Indikator Kinerja | ➤ | <i>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan</i>   |
| Strategi            | : | Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  |
| Arah Kebijakan      | : | 1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM<br>2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai   |

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu tetap terdiri dari 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas. Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %		61,670,755,109	61,670,755,109	60,654,991,000	(1,015,764,109)
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %		14,833,556	14,833,556	18,613,556	3,780,000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	14,833,556	14,833,556	18,613,556	3,780,000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		8,617,164,964	8,617,164,964	6,942,989,145	(1,674,175,819)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 Dokumen	38 Dokumen	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,617,164,964	8,617,164,964	6,942,989,145	(1,674,175,819)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>1,364,298,770</b>	<b>1,364,298,770</b>	<b>2,068,603,170</b>	<b>704,304,400</b>
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	SILPA (PAD)	233,320,670	233,320,670	281,104,070	47,783,400
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	SILPA (PAD)	76,159,100	76,159,100	76,159,100	-
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	100 %	SILPA (PAD)	207,380,000	207,380,000	216,130,000	8,750,000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	SILPA (PAD)	16,830,000	16,830,000	16,830,000	-
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	100 %	SILPA (PAD)	569,569,000	569,569,000	666,540,000	96,971,000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	SILPA (PAD)	261,040,000	261,040,000	811,840,000	550,800,000
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>2,501,510,493</b>	<b>2,501,510,493</b>	<b>2,441,375,493</b>	<b>(60,135,000)</b>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100 %	100 %	SILPA (PAD)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	SILPA (PAD)	1,901,510,493	1,901,510,493	1,841,375,493	(60,135,000)
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>1,006,700,000</b>	<b>1,006,700,000</b>	<b>1,012,700,000</b>	<b>6,000,000</b>
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	370,000,000	370,000,000	370,000,000	-
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	294,950,000	294,950,000	294,950,000	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100 %	100 %	SILPA (PAD)	92,250,000	92,250,000	98,250,000	6,000,000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH	249,500,000	249,500,000	249,500,000	-
<b>4.02.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>350,072,000</b>	<b>350,072,000</b>	<b>315,152,000</b>	<b>(34,920,000)</b>
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100 %	100 %	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350,072,000	350,072,000	315,152,000	(34,920,000)
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>47,515,758,826</b>	<b>47,515,758,826</b>	<b>47,555,141,136</b>	<b>39,382,310</b>
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	SILPA (PAD)	47,135,248,826	47,135,248,826	47,174,631,136	39,382,310

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	45 Stel	45 Stel	SILPA (PAD)	277,310,000	277,310,000	277,310,000	-
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 Orang	45 Orang	SILPA (PAD)	103,200,000	103,200,000	103,200,000	-
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>300,416,500</b>	<b>300,416,500</b>	<b>300,416,500</b>	<b>-</b>
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi	25 Kali	20 Kali	SILPA (PAD)	43,375,000	43,375,000	43,375,000	-
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat rapat DPRD	22 Kali	14 Kali	SILPA (PAD)	257,041,500	257,041,500	257,041,500	-
<b>4.02.02</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>1. Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu 2. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>100 % 86 %</b>	<b>100 % 86 %</b>		<b>19,101,694,540</b>	<b>19,101,694,540</b>	<b>25,016,492,540</b>	<b>5,914,798,000</b>
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>4,028,890,300</b>	<b>4,028,890,300</b>	<b>4,737,060,300</b>	<b>708,170,000</b>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda</li> <li>– Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda</li> </ul>	2 Dokumen  100 %	2 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	322,752,000	322,752,000	536,934,000	214,182,000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda</li> <li>Persentase pelaksanaan perdin Pansus</li> </ul>	12 Dokumen  100 %	12 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	3,554,938,300	3,554,938,300	4,100,126,300	545,188,000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik	3 Dokumen	2 Dokumen	SILPA (PAD)	151,200,000	151,200,000	100,000,000	(51,200,000)
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>573,923,000</b>	<b>573,923,000</b>	<b>930,507,000</b>	<b>356,584,000</b>
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS</li> <li>– Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran</li> </ul>	5 Dokumen  100 %	2 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	547,823,000	547,823,000	904,407,000	356,584,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA (PAD)	6,525,000	6,525,000	6,525,000	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA (PAD)	6,525,000	6,525,000	6,525,000	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 Dokumen	2 Dokumen	SILPA (PAD)	6,525,000	6,525,000	6,525,000	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	3 Dokumen	SILPA (PAD)	6,525,000	6,525,000	6,525,000	-
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>6,810,882,000</b>	<b>6,810,882,000</b>	<b>10,296,204,000</b>	<b>3,485,322,000</b>
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum</li> <li>– Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum</li> </ul>	4 Dokumen  100 %	4 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	1,669,068,000	1,669,068,000	2,529,378,000	860,310,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur</li> <li>– Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur</li> </ul>	4 Dokumen  100 %	4 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	1,788,505,000	1,788,505,000	2,705,122,000	916,617,000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>– Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat</li> </ul>	4 Dokumen  100 %	4 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	1,781,634,000	1,781,634,000	2,701,786,000	920,152,000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian</li> <li>– Persentase pelaksanaan perdin bidang perekonomian</li> </ul>	4 Dokumen  100 %	4 Dokumen  100 %	SILPA (PAD)	1,565,675,000	1,565,675,000	2,353,918,000	788,243,000
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 Dokumen	1 Dokumen	SILPA (PAD)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 Dokumen	1 Dokumen	SILPA (PAD)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>3,078,155,000</b>	<b>3,078,155,000</b>	<b>4,354,075,000</b>	<b>1,275,920,000</b>
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	2 Kali	4 Kali	SILPA (PAD)	1,935,582,000	1,935,582,000	2,994,100,000	1,058,518,000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pengangkatan kelompok pakar dan/atau tim ahli	6 Orang	3 Orang	SILPA (PAD)	360,000,000	360,000,000	270,000,000	(90,000,000)
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 Orang	5 Orang	SILPA (PAD)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100 %	100 %	SILPA (PAD)	5,625,000	5,625,000	10,125,000	4,500,000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	– Jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD – Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah	12 Dokumen 100 %	12 Dokumen 100 %	SILPA (PAD)	476,948,000	476,948,000	779,850,000	302,902,000
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pelaksanaan reses tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>3,512,134,440</b>	<b>3,512,134,440</b>	<b>3,512,884,440</b>	<b>750,000</b>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		SUMBER DANA	APBD INDUK	PERGESERAN	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
			INDUK 2022	PERUBAHAN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-7
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	3 Dokumen	SILPA (PAD)	3,512,134,440	3,512,134,440	3,512,884,440	750,000
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>172,072,000</b>	<b>172,072,000</b>	<b>277,610,000</b>	<b>105,538,000</b>
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	– Jumlah dokumen rapat kode etik  – Persentase pelaksanaan perdin Badan kehormatan	2 Dokumen  100 %	1 Dokumen  100 %	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	172,072,000	172,072,000	277,610,000	105,538,000
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>925,637,800</b>	<b>925,637,800</b>	<b>908,151,800</b>	<b>(17,486,000)</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rapat atau perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5 Kali	5 Kali	SILPA (PAD)	925,637,800	925,637,800	908,151,800	(17,486,000)
<b>TOTAL</b>						<b>80,772,449,649</b>	<b>80,772,449,649</b>	<b>85,671,483,540</b>	<b>4,899,033,891</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022. Perumusan perubahan rencana kerja ini digunakan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah telah melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan perubahan uraian belanja sebanyak 2 (dua) kali dan telah mencapai realisasi fisik kegiatan sebesar 59,04% dengan serapan anggaran sebesar 38,96% dari pagu anggaran sebesar Rp 80.772.449.649,- atau 72,86% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 43.198.029.451,-. Rancangan perubahan rencana kerja tahun 2022 tetap melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Namun, terdapat perubahan pendanaan dengan rancangan penambahan sebesar Rp 4.899.033.891,- sehingga pagu anggaran perubahan menjadi Rp 85.671.483.540,-.

Demikian perubahan rencana kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 2 Agustus 2022

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



H. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

**Formulir E.70**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar  
Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			

11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 8 Agustus 2022

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Dr. I Gde Made Bhaju Pravita, MM

NIP. 196811141998031003